ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DISPERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN POHUWATO DENGAN PENDEKATAN *COST BENEFIT ANALYSIS*

Rahma Nurtiya Matani
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
rhmanrtya@gmail.com

Felmi D. Lantowa
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

(No HP : WhattApss : 082188764929)

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Diterima :
Direvisi :
Disetujui :

Keywords: *Financial Efficiency, Cost Benefit Analysis, Small and Medium Enterprises, Payback Period, Net Present Value, Benefit Cost Ratio*

Kata kunci: Efisiensi Keuangan, *Cost Benefit Analysis*, Usaha Kecil Menengah, *Payback Period*, *Net Present Value*, *Benefit Cost Ratio*

ABSTRACT:

This research aimed to analyze the efficiency of financial management at the Department of Industry, Trade, Cooperatives, and SMEs of Pohuwato Regency using the Cost-Benefit Analysis (CBA) approach, identify effective programs, and provide strategic recommendations. The study employed a quantitative descriptive method, utilizing efficiency ratios, Payback Period, Net Present Value (NPV), and Benefit Cost Ratio (BCR). The results indicated that financial efficiency during 2022-2024 was classified as fairly efficient, with an average of 82.81% However, the CBA results showed that the investment was not economically viable, with a negative NPV, a Payback Period exceeding three years, and a BCR of less than 1. Interviews with SMEs revealed that the assistance provided by the government was beneficial. However, there were weaknesses in administrative aspects and an understanding of regulations. SME operators stated that they had never made payments to the local government and were unaware of tax obligations stipulated in Government Regulation No. 23 of 2018. Therefore, a comprehensive evaluation and ongoing support were needed to improve program effectiveness and regional budget efficiency.

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi pengelolaan keuangan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato melalui pendekatan Cost Benefit Analysis (CBA), mengidentifikasi program yang efektif, serta memberikan rekomendasi strategis.

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan rasio efisiensi, Payback Period, Net Present Value (NPV), dan Benefit Cost Ratio (BCR), hasil menunjukkan efisiensi keuangan selama 2022–2024 tergolong cukup efisien dengan rata-rata 82,81%, sedangkan hasil CBA menunjukkan investasi belum layak secara ekonomi, dengan NPV negatif, Payback Period di atas tiga tahun, dan BCR kurang dari 1. Akan tetapi hasil wawancara dengan pelaku UKM menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah bermanfaat. Namun terdapat adanya kelemahan dalam aspek administratif dan pemahaman regulasi. Pelaku UKM menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pembayaran kepada pemerintah daerah dan tidak mengetahui adanya kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh serta dukungan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas program dan efisiensi anggaran daerah.

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dan departemen-departemen dibawahnya dengan tujuan sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia yang semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap nasib suatu daerahnya(Dewi, 2023).

Pada faktanya oranisasi publik dimata masyarakat ini adalah organisasi yang pada pelaksanaan perkerjaannya kurang maksimal, kurangnya produktifitas, kualitas pada kinerja yang rendah, dan juga terdapat inefisiensi pada dana yang digunazkan. Aktibatnya masyarakat menssuntut sebuah keterbukaan yang bersih atas kinerja dalam organisasi sector publik ini yang dimana sesuai pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Serta Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar untuk reformasi kelembagaan dalam menghasilkan good government, ialah sesuatu pemerintahan yang transparan,

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan (Meitharina, 2023)

Akuntabilitas didalam keuangan daerah adalah proses dari pengelolaan dalam keuagan daerah dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan yang nantinya dapat dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada pihak pihak yang terkait dan juga masyarakat dengan hasil yang trasnparan baik keberhasilan maupun hambatan, dan hasil tersbut dapa dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya(Meitharina, 2023). Peran masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban ini bukan hanya untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban dari pengeolaan keuangan daerah tersebut melainkan masyarakat disini juga dapat berperan untuk menuntut atas pertanggungjawaban pengoprasian dan juga pelaksanaan mengenai penggunakaan dana tersebut.

Laporan pertanggungjawaban adalah hal wajib yang harus dilakukan oleh para pemerintah daerah terhadap apa saja rencana-rencana yang sudah berlangsung dalam rangka pensejahteraan rakyat yang dimana pelaporanini harus dilakukan secara terbuka dan juga terjamin ketransparanannya. Laporan pertanggungjawaban ini juga dapa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk organisasi public terkait yang dimana dapat dijadikan sebuah acuan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi kedepan.

Pengelolaan keuangan yang efisien merupakan fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisaasi kedepan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah sebagai pengelola anggaran publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah keterbatasan sumber daya yang tersedia, efisiensi dalam pengelolaan keuangan menjadi semakin penting untuk memaksimalkan manfaat dari setiap pengeluaran yang dilakukan.

Keuangan mejadi sebuah faktor penting yang ada didalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan kurang maksimalnya fungsi para pemerintah daerah tanpa biaya yang memadai dalam rangka memberikan sebuah pelayanan yag berjalan dengan optimal bagi masyarakat dalam hal pembangunan. Untuk mengetahui kinerja dari organisasi pemerintah daerah maka diperlukan

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan mengukur kinerja organisasi tersebut dengan melihat laporan keungannya. Dari laporan keuangan tersebut dapat dilihat apakah penyerapan anggaran berjalan secara efektif atau tidak (Meitharina, 2023). Maka dari itu pemerintah daerah memiliki keharusan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dapat diketahui kapabilitas yang dimiliki oleh pemerintah tersebut dalam pengaturan dan juga pengurusan daerahnya masing-masing. Maka dengan terjadinya hal tersebut diperlukan suatu perancangan untuk pelaksanaan keuangan daerah tersebut demi terselenggara dengan baik program tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini merupakan salah satu peran dari instasi pemerintah daerah yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM). Disperindagkop memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UKM. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing daerah.

Salah satu daerah di Provinsi Gorontalo memiliki potensi ekonomi yang besar, khususnya dalam pengembangan sektor UKM dan koperasi adalah Kabupaten Pohuwato. Namun, pengelolaan keuangan pada sektor ini sering kali menghadapi berbagai kendala, hal ini sebagaimana dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato Tahun 2022-2024

Realisasi Anggaran Tahun 2022			
Uraian	**Anggaran 2022**	**Realisasi 2022**	**Persentase (%)**
Belanja Daerah	7.074.865.753	6.991.050.075,00	98,82
Belanja Operasi	7.051.074.956	6.967.259.278,00	98,81
Belanja Barang Dan Jasa	3.961.064.163	3.922.308.535,00	99,02
Belanja Modal	23.790.797	23.790.797,00	100
Surplus/Defisit	**-6.333.105.753**	**-6.272.100.595,20**	**99,04**

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Realisasi Anggaran Tahun 2023			
Uraian	**Anggaran 2023**	**Realisasi 2023**	**Persentase (%)**
Belanja Daerah	11.997.476.126,00	7.553.552.038,00	62,95
Belanja Operasi	11.745.368.726,00	7.311.147.688,00	63,71
Belanja Barang Dan Jasa	8.706.312.502,00	4.851.517.559,00	55,72
Belanja Modal	252.107.400,00	242.404.350,00	96,15
Surplus/Defisit	**-11.255.716.126,00**	**-7.112.709.038,00**	**63,19**
Realisasi Anggaran Tahun 2024			
Uraian	**Anggaran 2024**	**Realisasi 2024**	**Persentase (%)**
Belanja Daerah	6.304.815.444	5.811.118.858,00	92,17
Belanja Operasi	6.082.825.394	5.611.778.908,00	92,26
Belanja Barang Dan Jasa	2.995.938.228	2.727.551.271,00	91,04
Belanja Modal	221.990.050	199.339.950,00	89,8
Surplus/Defisit	**-5.538.055.444**	**-5.376.096.858,00**	**97,08**

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato (2025)

Berdasarkan data realisasi anggaran diatas, terlihat adanya ketidakseimbangan dalam pemanfaatan anggaran, seperti penurunan signifikan realisasi anggaran pada tahun 2023 dan peningkatan kembali di tahun 2024. Penurunan ini berpotensi mengurangi manfaat ekonomi jika alokasi anggaran tidak dioptimalkan.

Pendekatan Analisis Biaya-Manfaat (Cost Benefit Analysis - CBA) relevan dalam mengkaji efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato karena metode ini memungkinkan evaluasi antara pengeluaran biaya dan perolehan manfaat yang diperoleh dari realisasi anggaran. Melalui pendekatan CBA, penelitian ini dapat mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran dalam memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta memastikan biaya yang dikeluarkan seimbang dengan hasil yang diperoleh, sehingga kebijakan pengelolaan anggaran di masa depan dapat lebih efisien dan tepat sasaran. Penelitian yang menggunakan pendekatan *Cost Benefit Analysis* sejalan dengan nilai-nilai ini, karena metode tersebut mengevaluasi sejauh mana program-program yang dijalankan memberikan manfaat yang adil dan signifikan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan pendekatan *Cost Benefit Analysis* (CBA) untuk menganalisis investasi yang telah dilakukan apakah menguntungkan atau merugikan dan untuk menentukan kelayakan suatu program sebelum berinvestasi. CBA sendiri merupakan suatu pendekatan sistematis yang mempertimbangkan antara biaya (*cost*) yang dikeluarkan dan manfaat/keuntungan (*benefit*) yang akan dihasilkan serta kelayakan suatu proyek. Pendekatan *Cost-Benefit Analysis* (CBA) dapat diterapkan sebagai alat guna mengevaluasi sejauh mana program-program yang dijalankan oleh Disperindagkop dan UKM mampu memberikan manfaat yang seimbang atau bahkan melebihi biaya yang dikeluarkan (Wiratama, 2020). Pendekatan ini sangat relevan, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih selektif dan strategis dalam pengelolaan keuangannya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan keuangan pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato dengan pendekatan *Cost-Benefit Analysis*. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi program-program yang efektif dan efisien serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengelolaan anggaran yang lebih optimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan pendekatan akuntansi yang diterapkan untuk mengelola keuangan yang bersumber dari dana publik di berbagai institusi seperti lembaga negara, kementerian dan unit-unit di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, organisasi non-pemerintah, yayasan sosial, serta proyek kolaboratif antara sektor publik dan swasta. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik dipandang sebagai bentuk layanan yang utamanya berhubungan dengan aktivitas finansial yang dapat memberikan manfaat. Fungsi utamanya adalah menyajikan informasi serta

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

mengungkapkan terkait aktivitas dan performa keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang disebut dengan akuntabilitas publik. Artinya, informasi mengenai aktivitas serta kinerja keuangan baik di instansi pemerintahan pusat maupun daerah harus disajikan secara cepat, sesuai kebutuhan, dan disampaikan pada saat yang dibutuhkan (Amyulianthy, 2020) dalam (Hariono, 2024)

Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam mengelola keuangan pemerintah pusat maupun daerah, terutama untuk mendukung transparansi dan tanggung jawab publik. Fungsi dari akuntansi sektor publik diarahkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Keberhasilan pelayanan publik ini salah satunya dapat diidentifikasi melalui kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat (Martadinata, 2024).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Purba (2021) dalam (Opina, 2022), pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Dalam melakukan pengelolaan keuangan haruslah ada perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Media pencapaian tujuan tersebut dapat melalui tabungan, investasi, atau pengalokasian dana. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka tidak akan terjebak pada perilaku berkeinginan yang tidak terbatas.

Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diartikan sebagai daya guna, yang mengindikasikan bahwa efisiensi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada usaha atau pengorbanan yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, sehingga tidak terjadi pemborosan. Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang dilihat dari besar sumber daya atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil dari suatu kegiatan. Masalah efisiensi berhubungan erat dengan pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Secara umum, efisiensi mengacu pada perbandingan

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

antara keluaran (output) dan masukan (input), yang menunjukkan hubungan terbaik antara hasil yang dicapai dengan usaha yang dikeluarkan (Hidayati & Ali, 2023).

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio-rasio antara output/keluaran dan input/masukan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran rutin menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase (Suoth et al., 2020). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan jumlah realisasi pendapatan daerah. Menurut (Kus, 2021) dalam (Meilani, 2023) menghitung efisiensi penyerapan anggaran maka harus membandingkan anggaran belanja dinas dengan belanjanya. Berikut rumus rasio efisiensi untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja (Halim:2016) dalam (Armono et al., 2023).

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ Operasi}{Anggaran\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Pengukuran Efisiensi

Persentase pengukuran	Kriteria efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2010:24) dalam (Saknosiwi et al., 2021)

Cost Benefit Analysis

Cost Benefit Analysis (CBA) adalah suatu metode sistematis untuk mengevaluasi keputusan atau kebijakan berdasarkan perbandingan antara manfaat (benefit) yang dihasilkan dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan. Menurut (Mishan & Quah, 2021), CBA digunakan untuk membantu pengambil keputusan dalam menilai

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

apakah suatu proyek atau kebijakan layak secara ekonomi dengan mempertimbangkan semua dampak yang relevan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk moneter. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan manfaat bersih (net benefit) bagi masyarakat.

Dalam implementasinya, CBA mengharuskan identifikasi semua biaya dan manfaat, baik yang bersifat *tangible* (terukur) maupun *intangible* (tidak terukur), serta melakukan diskon atas nilai masa depan melalui penerapan prinsip nilai waktu uang (*time value of money*). Metode ini banyak digunakan di sektor publik, seperti dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan lingkungan, atau pengembangan ekonomi daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan efisiensi pengelolaan keuangan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato untuk kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 dengan teknik analisis yang digunakan adalah Rasio Efisiensi dan *Cost Benefit Analysis*. Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama dua bulan, mulai dari bulan Maret hingga Mei 2025, dengan fokus pada analisis efisiensi pengelolaan keuangan dengan pendekatan *cost benefit analysis*.

Populasi dalam penelitian ini semua data realisasi anggaran Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato Tahun 2022-2024. Pemilihan populasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat terkait implementasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efisien pengelolaan keuangan serta manfaat biaya realisasi anggaran telah dicapai oleh instansi tersebut. Adapun sampel dalam penelitian ini data realisasi anggaran tahun 2024, laporan e-monev terkait implementasi anggaran di Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato. Sampel ini bertujuan untuk memperoleh data yang representatif dan mendalam guna menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti terhadap akuntabilitas keuangan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui observasi awal, dokumentasi yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada. Sehingga peneliti dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

penelitian seperti, gambaran umum tempat penelitian, foto-foto, dokumentasi, dan lain sebagainya, wawancara dengan kepala bidang serta para pelaku UKM yang mendapatkan bantuan dari Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato, study kepustakaan yaitu pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literartur atau sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini dapat diperoleh dari data sekunder yaitu literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan bertujuan untuk mengetahui teori yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisa data pada penelitian ini yaitu menganalisis efisiensi pengelolaan keuangan pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato dengan pendekatan *cost benefit analysis* peneliti menggunakan beberapa metode atau rumus yaitu:

Rasio Efisiensi

Rumus yang digunakan yaitu:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja\ Operasi}{Anggaran\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

***Payback Period* (PP)**

Metode *Payback Period* (PP) ini menghitung berapa cepat investasi yang dilakukan dalam setiap periode. Waktu yang dihitung sejak dimulainya investasi hingga tercapainya titik impas, yang menunjukkan durasi pengembalian investasi atau biaya yang telah dikeluarkan. Rumus yang digunakan adalah:

$$Payback\ Period = \frac{Biaya\ Investasi}{Manfaat\ Tahunan}$$

Keterangan:

a. Biaya investasi : Total modal awal yang digunakan untuk proyek atau investasi
b. Manfaat tahunan : Arus kas masuk bersih yang dihasilkan setiap tahun dari investasi tersebut

Keputusan : semakin pendek waktu *Payback Period* (PP), semakin baik investasi tersebut karena lebih cepat memberikan pengembalian modal.

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

***Net Present Value* (NPV)**

Net Present Value (NPV) adalah metode yang digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari manfaat yang diterima (benefit) dengan biaya yang dikeluarkan (cost) selama masa investasi. Jika NPV positif, maka investasi dianggap menguntungkan karena menghasilkan nilai tambah. Adapun rumus yang digunakan yaitu:

$$NPV = \sum \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t}$$

Keterangan:

Bt : Manfaat atau pendapatan tahun ke-t

Ct : Biaya atau pengeluaran pada tahun ke-t

r : Tingkat diskonto atau tingkat pengembalian yang diharapkan

t : Periode waktu dalam setahun

Keputusan:

a. Jika NPV >0, proyek atau investasi menguntungkan dan layak dilakukan
b. Jika NPV <0, proyek atau investasi merugikan dan sebaiknya tidak dilakukan
c. Jika NPV = 0, proyek impas (tidak untung atau rugi)

***Benefit Cost Rasio* (BCR)**

Benefit Cost Rasio (BCR) atau rasio manfaat biaya adalah perbandingan antara total manfaat yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan total manfaat yang telah diidentifikasi selama periode investasi dengan total biaya yang semuanya dihitung dalam nilai sekarang (Present Value) pada tahun awal (tahun ke-0). Berikut adalah rumus yang digunakan:

$$BCR = \frac{\sum \frac{B_t}{(1+r)^t}}{\sum \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

Keputusan terkait kelayakan investasi dapat dianalisis dengan menggunakan nilai BCR yang ditetapkan seperti berikut:

a. Apabila BCR bernilai sama dengan atau lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari proyek tersebut melebihi biaya yang

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

dikeluarkan. Dengan demikian, proyek tersebut dianggap layak atau dapat diterima (feasible).

b. Sebaliknya, jika nilai BCR kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh dari proyek tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan, sehingga proyek tersebut dianggap tidak layak untuk dilaksanakan (not feasible).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis efisiensi pengelolaan keuangan Disperindagkop Dan UKM Kabupaten Pohuwato

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Liantino, 2018). Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acan tertentu, seperti efesiensi periode sebelumnya atau efesiensi di organisasi sektor publik lainnya. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana serendah rendahnya. Berikut hasl analisis rasio efisiensi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato:

1). Rasio efisisensi keuangan daerah tahun 2022

$$\text{Efisiensi} = \frac{6.967.259.278{,}00}{7.074.865.753} \times 100\% = 98{,}48\%$$

2). Rasio efisisensi keuangan daerah tahun 2023

$$\text{Efisiensi} = \frac{7.311.147.688{,}00}{11.997.476.126{,}00} \times 100\% = 60{,}94\%$$

3). Rasio efisisensi keuangan daerah tahun 2024

$$\text{Efisiensi} = \frac{5.611.778.908{,}00}{6.304.815.444} \times 100\% = 89{,}01\%$$

Tabel 3. Rasio Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Anggaran Belanja Daerah Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Operasi	Anggaran Belanja Daerah	Rasio	Ket.

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

2022	6.991.050.075,00	718.949.479,80	98,48%	Kurang efisien
2023	7.553.552.038,00	440.843.000,00	60,94%	Efisien
2024	5.811.118.858,00	435.022.000,00	89,01%	Cukup efisien

Sumber: Hasil Olah Data (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah yang ditampilkan pada tabel 4.1, pengelolaan keuangan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato, rasio efisiensi pengelolaan keuangan selama periode tahun 2022 hingga 2024, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, rasio efisiensi mencapai 98,48% yang mengindikasikan kondisi kurang efisien, karena belanja operasional hampir menyamai alokasi anggaran belanja daerah. Namun, pada tahun 2023 terjadi perbaikan dengan rasio efisiensi sebesar 60,94% yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berada dalam kategori efisien. Sementara itu, pada tahun 2024 rasio efisiensi tercatat sebesar 89,01% dan dikategorikan cukup efisien. Jika dilihat secara rata-rata, tingkat efisiensi dalam kurun waktu tiga tahun tersebut adalah sebesar 82,81%, yang menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan berada dalam kategori cukup efisien. Oleh karena itu, meskipun terdapat capaian efisiensi yang baik di tahun tertentu, dibutuhkan konsistensi dan penguatan pengelolaan keuangan agar efisiensi penggunaan anggaran dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada kepala sub bagian perencanaa dan keuangan Disperindagkop dan UKM, dimana anggaran untuk setiap program terealisasi secara optimal akan tetapi indikator capaian program yang masih belum terealisasi sesuai dengan yang di harapkan. Seperti indikator persentase koperasi yang tertib administrasi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan agar efisiensi dapat tercapai di masa mendatang.

Analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis pengelolaan keuangan Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato

1) Payback Period

Payback Period adalah metode untuk menghitung berapa cepat investasi yang dilakukan dalam setiap periode (Rahmiyati, 2019). Metode ini merupakan waktu

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

yang diukur pada saat dimulainya investasi sampai dengan tercapainya break even point yang menunjukkan lamanya waktu pengembalian biaya atau investasi yang dikeluarkan.

$$2022 = \frac{2.269.950.213}{718.949.479} = 3{,}16$$

$$2023 = \frac{2.966.361.995}{440.843.000} = 6{,}73$$

$$2024 = \frac{1.413.384.500}{435.022.000} = 3{,}25$$

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, periode pengembalian investasi tercatat selama 3,16 tahun, yang berarti bahwa dibutuhkan lebih dari tiga tahun agar biaya investasi dapat kembali. Sementara itu, pada tahun 2023, periode pengembaliannya meningkat tajam menjadi 6,73 tahun, mencerminkan jangka waktu yang jauh lebih panjang dalam memperoleh kembali dana investasi yang telah dikeluarkan. Adapun pada tahun 2024, nilai Payback Period sedikit menurun menjadi 3,25 tahun, namun tetap berada di atas ambang tiga tahun.

Nilai Payback Period yang berada di atas tiga tahun, terutama pada tahun 2023, mengindikasikan bahwa program atau kegiatan yang dibiayai membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan manfaat ekonomi atau pengembalian investasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran investasi tersebut tidak memberikan dampak yang cepat dalam hal efisiensi keuangan. Dalam kerangka pengelolaan keuangan yang efisien, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi, maka semakin besar pula potensi terjadinya ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran.

2) Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) adalah metode yang digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari manfaat yang diterima (benefit) dengan biaya yang

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

dikeluarkan (cost) selama masa investasi. Jika NPV positif, maka investasi dianggap menguntungkan karena menghasilkan nilai tambah (Tenaleluni, 2024).

$$2022 = \sum \frac{718.949.479 - 2.269.950.213}{(1 + 0{,}05)^1}$$

$$\sum \frac{-1.551.000.734}{1{,}05} = -1.477.143.556$$

$$2023 = \sum \frac{440.843.000 - 2.966.361.995}{(1 + 0{,}05)^1}$$

$$\sum \frac{-2.525.518.995}{1{,}05} = -2.405.256.185$$

$$2024 = \sum \frac{435.022.000 - 1.413.384.500}{(1 + 0{,}05)^1}$$

$$\sum \frac{-978.362.500}{1{,}05} = -931.773.809$$

Dari hasil analisis menggunakan metode Net Present Value (NPV) turut memperkuat kesimpulan yang diperoleh dari analisis Payback Period terkait kelayakan ekonomi atas investasi yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan perhitungan, nilai NPV pada tahun 2022 tercatat sebesar -Rp1.477.143.556, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan lebih lanjut menjadi -Rp2.405.256.185, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar -Rp931.773.809. Ketiga nilai tersebut berada dalam posisi negatif, yang secara ekonomi mencerminkan bahwa jumlah manfaat ekonomi yang diperoleh dari program atau kegiatan yang dibiayai tidak mampu menutupi nilai investasi yang telah dikeluarkan, apabila dihitung berdasarkan konsep nilai waktu dari uang (time value of money).

3) Benefit Cost Ratio (BCR)

Metode BCR adalah suatu cara evaluasi proyek dengan membandingkan nilai sekarang seluruh proyek/program diperoleh dari proyek/program tersebut dengan nilai sekarang. Berdasarkan metode ini, suatu program akan dilaksanakan apabila BCR >1 (Rahmiyati, 2019).

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

$$2022 = \frac{\sum \frac{718.949.479}{(1{,}05)^1}}{\sum \frac{2.269.950.213}{(1{,}05)^1}}$$

$$= \frac{684.713.789{,}52}{2.161.857.345{,}71} = 0{,}31$$

$$2023 = \frac{\sum \frac{440.843.000}{(1{,}05)^1}}{\sum \frac{2.966.361.995}{(1{,}05)^1}}$$

$$= \frac{419.850.476{,}19}{2.825.106.661{,}90} = 0{,}14$$

$$2024 = \frac{\sum \frac{435.022.000}{(1{,}05)^1}}{\sum \frac{1.413.384.500}{(1{,}05)^1}}$$

$$= \frac{414.306.666{,}66}{1.346.080.476{,}19} = 0{,}30$$

Dari hasil penelitian, Benefit Cost Ratio (BCR) diketahui bahwa rasio antara manfaat dan biaya dari program yang dijalankan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato selama tahun 2022 hingga 2024 seluruhnya menunjukkan angka di bawah 1. Secara rinci, nilai BCR pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,31, kemudian menurun menjadi 0,14 pada tahun 2023, dan kembali sedikit meningkat menjadi 0,30 di tahun 2024. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan program-program tersebut belum mampu menutupi atau melebihi jumlah biaya investasi yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan hasil analisis Cost Benefit Analysis (CBA) yang mencakup metode Payback Period, Net Present Value (NPV), dan Benefit Cost Ratio (BCR), dapat disimpulkan bahwa investasi yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato selama periode 2022 hingga 2024 belum layak secara ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Payback Period yang melebihi tiga tahun, bahkan mencapai 6,73 tahun pada 2023, menandakan rendahnya efisiensi dalam pengembalian investasi. Selain itu, nilai NPV selama tiga tahun berturut-turut berada dalam kondisi negatif, yang berarti bahwa manfaat ekonomi dari program yang

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

dijalankan tidak mampu menutupi biaya investasi yang dikeluarkan. Sementara itu, rasio BCR yang selalu di bawah angka 1 (masing-masing 0,31; 0,14; dan 0,30) memperkuat indikasi bahwa program yang dilaksanakan tidak memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biayanya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pada Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato selama periode 2022 hingga 2024 masih menunjukkan kinerja yang belum optimal. Meskipun terjadi peningkatan pada rasio efisiensi di tahun 2023 dengan mencapai 60,94%, secara keseluruhan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dalam kurun waktu tiga tahun tersebut hanya tercatat sebesar 82,81%, yang menunjukkan kategori efisiensi yang masih cukup. Perhitungan Payback Period yang melebihi tiga tahun, terutama pada tahun 2023, mengindikasikan bahwa periode pengembalian investasi yang relatif lama mencerminkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, yang berisiko terhadap pemborosan sumber daya. Selain itu, hasil analisis NPV yang negatif pada seluruh tahun yang diteliti menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan yang dibiayai tidak mampu menutupi biaya investasinya, yang berarti bahwa investasi tersebut tidak layak secara ekonomi. Demikian pula, perhitungan BCR yang selalu di bawah angka 1 pada tahun 2022, 2023, dan 2024 menguatkan temuan bahwa manfaat dari investasi tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga program yang didanai selama periode tersebut tidak efisien dan tidak memberikan hasil yang optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan menekankan efisiensi anggaran melalui seleksi program yang lebih ketat, evaluasi rutin, serta optimalisasi pemanfaatan dana untuk mendorong peningkatan PAD. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi kepada pelaku UKM terkait kewajiban perpajakan sesuai PP No. 23 Tahun 2018 guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan yang berkontribusi langsung pada pendapatan daerah. Peneliti dan akademisi diharapkan melakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor penyebab ketidakefisienan serta pengembangan model perencanaan investasi yang lebih efektif. Sementara itu, pelaku UKM perlu meningkatkan literasi keuangan, menerapkan pembukuan sederhana, serta menjalin komunikasi aktif dengan instansi terkait agar dapat

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

mengelola usaha secara profesional, patuh hukum, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Armono, D., Widiyaningsih, N., & Nurhayanto. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi, UMK, UM Dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, *20*(1), 323–331.

Dewi, K. I. T. (2023). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2017-2022 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.

Hariono, S. R. (2024). Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Anggaran Di Pemerintah Kota Malang.

Hidayati, Y., & Ali, H. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, *8*(1), 250–257.

Liantino, W. (2018). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta. *Inovasi*, *13*(2), 92.

Martadinata, S. (2024). Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, *2*(6), 620–624.

Meilani. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pada Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batu Bara. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).

Meitharina, A. (2023). Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Value For Money Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cianjur Tahun 2020 – 2021. In *Procedia Manufacturing* (Vol. 1, Issue 22 Jan).

Mishan, E. J., & Quah, E. (2021). Cost-Benefit Analysis. In *Ecological Economics* (6th Ed., Pp. 10–15). Roudledge.

Opina, A. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keungan Daerah Kabupaten Toba. *(Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).*

Rahmiyati, A. L. (2019). Cost Benefit Analysis (CBA) Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Susu Pada Karyawan Di PT. Trisula Textile Industries Tbk Cimahi Tahun 2018. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, *3*(1).

Saknosiwi, Y. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *21*(03), 37–45.

ISSN: 2723-1399
e-ISSN: 2723-1488
JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI
Available online at: http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA
DOI: https://doi.org/10.36085/jakta.v2i1

Suoth, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2020). Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (Dpkpa) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, *4*(1), 613–622.

Tenaleluni, C. S. (2024). Cost Benefit Analysis (Cba) Dalam Pengadaan Aset Pada *PT. TAT* (Vol. 15, Issue 1). Universitas Dinamika.

Wiratama, A. (2020). Optimalisasi Investasi Si / Ti Dengan Metode Cost Benefit Analysis (Cba) Di Instansi Pemerintah.